

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua Negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera maka upaya pokok yang sangat penting adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil, sehingga masalah-masalah dalam Negara stabil dan mempermudah Negara dalam mencapai kemajuan.

Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau.

Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016.

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia saat ini secara *de facto* terdiri dari 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7024 daerah setingkat kecamatan atau 81626 daerah setingkat desa. Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta, dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta. 130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi suatu Negara dalam jangka panjang, karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah.

Struktur perekonomian di suatu wilayah dapat menggambarkan kontribusi sektoral. Disamping itu besarnya kontribusi juga menggambarkan peran sektor dalam perekonomian. Semakin besar peranan suatu sektor perekonomian, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut sebagai *engine growth* atau mesin dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik di setiap provinsi dan memiliki potensinya masing-masing.

**Tabel 1.1**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**di Indonesia Tahun 2016**

Tahun	Jumlah
2012	6.03
2013	5.56
2014	5.01
2015	4.88
2016	5.03

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah).*

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan perekonomian Indonesia sepanjang 2016 hanya bertumbuh 5,02 persen. Angka pertumbuhan tersebut meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar 5,2 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2016 yang hanya mencapai 4,94 persen menjadi penyebabnya.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2016 lantaran belanja pemerintah lebih kecil dibanding pada 2015. Belanja pemerintah sebenarnya menjadi andalan untuk mendongkrak perekonomian dalam dua tahun terakhir. Di tengah lesunya ekspor-impor akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat, belanja pemerintah menjadi harapan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Widyanita, pertumbuhan ekonomi 2016 dibawah target  
<https://katadata.co.id/infografik/2017/02/08/pertumbuhan-ekonomi-2016-di-bawah-target>  
 (diakses pada tanggal 13 mei 2016)

Beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan masalah pertumbuhan ekonomi dalam kasus ini diantaranya adalah komponen investasi PMA dan pengeluaran pemerintah. Kemudian faktor-faktor lain yang berpotensi menimbulkan masalah pertumbuhan ekonomi antara lain Ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK), Jumlah wirausahawan, dan tingkat pendidikan.

Investasi sangat di harapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi ini, peran investasi oleh swasta sangat diharapkan, baik investasi dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia peran investasi swasta untuk bisa diharapkan.

Semenjak orde baru terjadi peningkatan investasi (PMA dan PMDN), sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata diatas 6% pertahun. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tersebut, Indonesia telah memasuki Negara industri baru lapis kedua. Dengan pertumbuhan industri 20% pertahun, telah mengubah struktur perekonomian Indonesia dari ekonomi yang bersifat agraris menjadi Negara industri. Perubahan struktur tersebut tidak lepas dari peran investasi yang berperan penting untuk terjadinya perubahan dalam perekonomian Indonesia<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Mulia Nasution, 1997, *TEORI EKONOMI MAKRO: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia.*, Jakarta, Djambatan, Hal.114

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi**  
**Tahun 2016 (Dalam Juta Dollar)**

Tahun	Jumlah
2012	24 564.70
2013	24 564.70
2014	28 529.70
2015	29 275.90
2016	28 964.10

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan realisasi investasi PMA dalam dollar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Dan di tahun 2017 investasi PMA naik cukup tajam. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Penanaman Modal Asing (PMA) menurun untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 lalu. Investasi asing pada kuartal satu 2016 sebesar Rp 96,1 triliun atau turun dari kuartal keempat tahun lalu yang mencapai Rp 99,2 triliun.

Deputi Bidang Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan dirinya masih mengkaji kenapa PMA kuartal I 2016 ini mengalami penurunan pertama kali dalam lima tahun. Namun Azhar memperkirakan saat ini investor luar masih menunggu kepastian langkah Pemerintah berikutnya termasuk paket deregulasi berikutnya dari Pemerintah. “Jadi mungkin masih ada *wait and see* di sini,” kata Azhar saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 25 April 2016.

Walau investasi asing menurun, namun secara keseluruhan, BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama 2016 ini sebesar Rp 146,5 triliun atau naik 17,6 persen dari periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan bila dibandingkan dengan triwulan keempat 2015, angka tersebut naik dari jumlah saat itu Rp 145,4 triliun.<sup>3</sup>

Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBN memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi Negara. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari semua sumber daya yang ada dalam perekonomian. Perekonomian pasar selalu terlilit monopoli seiring melonjaknya inflasi dan pengangguran dan prakteknya distribusi pendapatan masyarakat tidak merata.

---

<sup>3</sup> Ameidyo Daud, Pertama dalam 5 tahun terakhir investasi asing di Indonesia menurun. <https://katadata.co.id/berita/2016/04/25/tunggu-kepastian-investasi-asing-turun-dalam-negeri-naik> (diakses pada tanggal 13 mei 2016)

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur total dalam setiap tahunnya di Indonesia dapat dilihat di tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia**  
**Tahun 2016 (Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Jumlah
2012	207.137
2013	231.781
2014	259.886
2015	274.966
2016	294.782

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan data pada tabel realisasi pengeluaran pemerintah mengalami turun yang signifikan berdasarkan persentase, dan khususnya di tahun 2013 -2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dalam laju ditahun 2013 sebesar 0,47%. Penurunan yang cukup signifikan ini hingga 2016 pesentasenya hanya sebesar 0,07.

Anggaran belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2016 ditetapkan sebesar Rp1.306,7 triliun, turun Rp18,9 triliun jika dibandingkan anggaran dalam APBN 2016 yang sebesar Rp1.325,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penurunan dari Rp784,1 dalam APBN 2016 menjadi Rp767,8 triliun dalam APBN-P 2016. Sementara, belanja non-K/L turun dari Rp541,4 dalam APBN 2016 menjadi Rp538,9 triliun dalam APBN-P 2016.

Penurunan pada belanja K/L ini sejalan dengan langkah penghematan anggaran belanja pemerintah, khususnya untuk belanja operasional dan belanja kurang produktif. “Belanja K/L mengalami penurunan terutama karena kebijakan penghematan atau pemotongan belanja operasional, tapi di satu sisi ada kebutuhan mendesak, maka ada juga tambahan anggaran mendesak,” ungkap Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar belanja subsidi dapat lebih tepat sasaran (*well targeted*). Hal ini salah satunya ditandai dengan penurunan pada belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan pada subsidi listrik. “Subsidi BBM turun Rp20 triliun, subsidi listrik naik Rp12,3 triliun,” jelasnya.<sup>4</sup>

Salah faktor yang juga berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi adalah IPTEK, karena selain didukung oleh sumber daya manusia, cepat atau lambatnya proses pembangunan juga di pengaruhi oleh pengguna IPTEK, semakin canggih/bagus IPTEK yang dimiliki maka semakin cepat pula pembangunan berlangsung. Dengan pesatnya perkembangan IPTEK maka akan canggih serta memiliki efisiensi, kualitas dan kuantitas yang jauh

---

<sup>4</sup> Kemenkeu, Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN-P 2016 turun Rp18,9 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/belanja-pemerintah-pusat-dalam-apbn-p-2016-turun-rp18-9-triliun/> (dilihat pada tanggal 20 april 2017)

lebih tinggi, hal ini dapat berakibat pada semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi.

Tiap-tiap provinsi memiliki sumber daya alam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa kekayaan alam seperti cuaca/iklim, struktur tanah, hasil hutan, pertanian, tambang, dan hasil laut. Sumber daya alam yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penambahan bahan baku untuk menambah kekayaan Negara. Bila SDM yang baik di olah SDA yang mumpuni maka kualitas dari hasil yang dijual akan menambah perekonomian serta tumbuhnya sektor industri yang membuat maju Negara.

Faktor sosial dan politik juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tanpa keadaan sosial dan politik yang baik maka akan sulit mendukung berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif di suatu daerah. Andaikan Indonesia mengalami goncangan di masyarakatnya maka para investor akan ragu dalam menanamkan saham di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dari seluruh permasalahan yang terlihat bahwa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah investasi domestik karena di harapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan Pengeluaran pemerintah sebagai instrumen fiskal sebagai penerimaan Negara untuk pertumbuhan ekonomi Negara lebih baik. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian pengaruh investasi PMA dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. Pengaruh investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Pengaruh SDM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Pengaruh IPTEK terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah yang timbul dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah didalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Investasi PMA dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibuat maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
3. Apakah ada pengaruh investasi PMA dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang investasi PMA, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan investasi PMA, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.